

Kabupaten Bengkulu Utara

Sumber : Rakyat Bengkulu/Bengkulu Ekspres/Radar Bengkulu/Kompas/Media Indonesia

Tanggal : 06 / 09 / 2018

215 Kades Dibekali Sistem Keuangan Desa

ARGA MAKMUR - Bengkulu Utara (BU) menjadi kabupaten pertama yang melakukan kegiatan Workshop Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dengan peserta 215 kepala desa dan bendahara desa yang ada di BU. Acara ini tentunya untuk memastikan desa melaksanakan pola pelaporan dan penggunaan sistem keuangan sesuai aturannya.

Narasumber yang hadir yakni Anggota Komisi X DPR RI dr. Anarulita M, Direktur Kriminal Khusus Polda Bengkulu Kombes. Pol. Drs. Herman, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Yuan Chandra Djaisin dan Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III BPKP, Iskandar Novianto.

Bupati BU, Ir. Mian menuturkan kegiatan ini sengaja dilaksanakan untuk memberikan pemahaman pada kades terkait pengelolaan keuangan desa yang sudah ditentukan. "Dengan kegiatan ini kepala desa diharapkan semakin mengerti dan bisa melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Kita juga senang narasumber yang paling berkompeten hadir menerangkan pada kepala desa," katanya.

Para narasumber menjelaskan mulai dari pola keuangan desa, belanja yang

tepat hingga pelanggaran-pelanggaran yang kerap dilaporkan terkait pelaksanaan DD dan ADD. Termasuk pola audit yang dilakukan BPK. "Jelas ini sangat bermanfaat. Apalagi, Presiden sudah menegaskan pembangunan dari desa didahulukan. Salah satunya dengan DD dan ADD," tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Bengkulu Yuan Chandra menerangkan pelaksanaan DD di desa juga berpengaruh pada Opini BPK yang diberikan. Opini BPK bisa berstatus Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau bahkan lebih jelek lagi jika penyelenggaraan DD tidak baik.

Di bagian lain, Kombes. Pol. Drs. Herman menerangkan dalam penegakan hukum terkait DD lebih mengedepankan Inspektorat atau Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Apalagi jika dalam asumsi kerugian negaranya lebih kecil dari biaya penanganan kasusnya. "Namun tetap kita tindak. Saya tegaskan pengembalian kerugian negara tidak menghapus perbuatan pidana yang sudah terjadi," tegasnya.

Workshop yang dilaksanakan di Balai Pertemuan Ratu Samban ini dipimpin Sekda BU Dr. Haryadi, MM, M.Si sebagai moderator. (qia)